

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI GENTENG DI KABUPATEN KEBUMEN

Oleh :

Bagus Daru Hari Respati

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Sudharto, S.H No. 1 Kampus Tembalang Semarang

bagus_respati@rocketmail.com

Abstract

The theme of entrepreneurship in the spotlight lately. Moreover, the industry is able to strengthen the local economy and reduce unemployment. This study aims to clarify the government's role in empowering the tile industry and identify the barriers tile employers and local governments in developing tile industry.

The variables used in this study the role and empowerment of the tile industry. The method used is descriptive research type. In this study used descriptive research type because it can portray the condition in a systematic, factual and accurate information on the facts, including the ongoing process and the influence of phenomena that exist on the tile industry in Kebumen regency.

The role of local government is crucial in empowering especially the tile industry that declined. The role of government in the empowerment consists of training, support tools, and marketing. Entrepreneurs perceived barriers are financial and non-financial issues, while the perceived barriers that local government communication and resource issues.

Keyword : Role, Empowerment, and Tile Industry

PENDAHULUAN

Tema kewirausahaan atau semangat kewirausahaan sedang digaungkan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Selain menggerakkan semangat kewirausahaan tidak menutup kemungkinan memberdayakan sektor industri. Sektor industri menjadikan penting sebagai jalan pengentasan pengangguran.

Industri dengan memanfaatkan halaman pekarangan ataupun kebun saja sudah mampu menghidupi banyak orang. Kebumen merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki industri dengan berbasis *local knowledge* dan *endogenous development*. Dengan berbasis hal tersebut dan menggunakan uang yang terbatas masyarakat mampu menjalankan roda bisnisnya. Selain berbasis hal itu industri di Kebumen

cukup dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor keturunan. Industri genteng di Kebumen salah satunya yang dipengaruhi oleh faktor keturunan yang menjadikan industri ini unik.

Industri ini menggunakan bahan baku utamanya pendayagunaan sumber daya setempat, keterampilan, dan karya seni. Dalam hal ini memunculkan pengembangan ekonomi yang *community enterprises* yaitu memacu peningkatan ekonomi atas swadaya dan kekuatan masyarakat.

Melihat pengembangan ekonomi lokal dan *community enterprises*, maka cirinya sebagai berikut (dalam Rajibianto, 2010: 5) :

1. Bahan baku mudah diperoleh, karena tersedia di daerah.
2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi.
3. Keterampilan dasar pada dasarnya sudah dimiliki secara turun temurun.
4. Bersifat padat karya dengan penyerapan tenaga kerja yang masif.
5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/ domestik dan berpotensi untuk di ekspor.
6. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan seni budaya setempat.
7. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat.
8. Secara ekonomis menguntungkan dengan basis *local knowledge*, serta didukung oleh kondisi sosio-kultural masyarakat menjadi peluang bagi industri untuk pengembangan usaha dan menjadi peluang bagi industri genteng untuk tetap eksis dalam persaingan usaha yang kompetitif.

Pada tahun 1980-an industri genteng Kebumen mampu menunjukkan kelasnya dengan memproduksi genteng kualitas nomor satu. Selain genteng Kebumen terkenal sebagai penghasil gula kelapa, emping mlinjo, lanting, batik, sabut kelapa,

anyaman pandan, anyaman bambu, minyak VCO, tas dan peci.

Persebaran industri genteng yang menjadi *icon* Kabupaten Kebumen terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sruweng, Klirong, Pejagoan, Kebumen, Sruweng. Persebaran industri genteng terbanyak menurut unit usaha tercatat pada tahun 2008 yaitu Kecamatan Pejagoan berjumlah 379 unit usaha. Namun Kecamatan Petanahan memiliki jumlah unit usaha sedikit dengan jumlah 20 unit usaha.

Secara mengejutkan dari tahun 2009 sampai tahun 2011 jumlah unit usaha industri genteng di Kecamatan Pejagoan mengalami penurunan sebanyak 25 %. Namun untuk jumlah unit usaha desa Logede dan Kebulusan dari tahun 2009-2011 mengalami peningkatan sebesar 20% dan 89%. Dalam hal ini menyangkut berbagai hal yang menyebabkan penurunan secara kuantitas dalam hal unit usaha industri genteng.

Masalah keterbatasan sumber daya bahan baku dan manusia,

menyebabkan penurunan unit usaha industri genteng. Selain masalah sumber daya yang menjadikan masalah utama yaitu lemahnya daya saing industri ini dengan industri substitusi genteng. Selain lemahnya daya saing, ada juga masalah kurangnya inovasi dan daya kreatifitas pembuat genteng menyebabkan industri stagnan dan berujung gulung tikar. Melihat *urgensi* masalah tersebut pemerintah daerah mempunyai otoritas untuk intervensi yang bertujuan mempertahankan eksistensi industri genteng. Pertanyaan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut adalah “Bagaimana peran pemerintah daerah beserta hambatanya dalam memberdayakan industri genteng?”

PEMBAHASAN

Dalam era otonomi daerah atau daerah berhak ber-*improvisasi* menentukan nasibnya sendiri. Tidak terkecuali bentuk intervensi pemerintah Kabupaten Kebumen dalam sektor industri genteng untuk mempertahankan eksistensinya.

Bentuk improvisasi pemerintah daerah secara konkret dapat dipahami

sebagai kebijakan. Menurut Thomas Dye (dalam Subarsono 2005:2) kebijakan merupakan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan dan tidak melakukan. Jadi bisa diartikan kebijakan sebagai pola tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah. Selain kebijakan untuk menyelamatkan industri genteng. Pemerintah daerah memerlukan model-model untuk mengimplementasikannya. Edward III mengemukakan model implementasi kebijakannya dengan *Direct And Indirect Impact Of Implementation*. Model ini dikatakan berhasil jika terdapat kejelasan dalam 4 hal yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pertama, komunikasi. Apa yang menjadi tujuan dari kebijakan bisa ditransmisikan atau disampaikan kepada kelompok sasaran (*target group*). Kebijakan yang dikomunikasikan harus akurat dan konsisten. Indikator dalam keberhasilan komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Kedua, sumberdaya. Apabila kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten namun kekurangan sumberdaya maka akan berdampak pula pada implementasi kebijakan. Sumberdaya dapat sumberdaya manusia atau kompetensi implementator dan sumberdaya finansial. Indikator keberhasilan variabel sumberdaya yaitu staf, informasi (informasi berupa data kepatuhan implementator dan regulasi yang ditetapkan), wewenang, fasilitas.

Ketiga, disposisi. Disposisi merupakan waktak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti kejujuran, kepatuhan, komitmen, dan sikap demokratis. Apabila implementator memiliki persepsi berbeda dengan pembuat kebijakan maka akan menimbulkan proses implementasi yang tidak efektif. Jika implementator menunjukkan disposisi yang positif maka kebijakan yang diimplementasikannya akan berjalan lancar.

Keempat, struktur birokrasi. Birokrasi berfungsi untuk mendorong kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang baik sesuai dengan *Standard Operating Procedures (SOPs)*. Apabila birokrasi terlalu rumit dan panjang akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Genteng

Ber macam masalah yang melanda industri genteng menyebabkan munculnya tindakan pemerintah untuk menyelamatkannya. Peran menurut E.St. Harahap, dkk (2007:854) seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam ilmu sosial peran merupakan fungsi yang dibawakan seseorang dan seseorang tersebut bisa menjalankan fungsinya dikarenakan posisi serta kedudukannya.

Setiap pemberdayaan dikatakan berhasil menurut Usman (2004:21) yaitu adanya batuan dana sebagai modal, pembangunan prasarana

pendukung, penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran, pelatihan, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Peranan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mempertahankan eksistensi industri genteng dengan cara pelatihan dan pendampingan, bantuan secara fisik, dan fasilitasi pemasaran. Hal yang dilakukan pemerintah daerah setidaknya sudah menunjukkan keberhasilan pemberdayaan.

Untuk pelatihan dan pendampingan, bantuan secara fisik dan fasilitasi pemasaran industri pemerintah daerah bekerjasama dengan Kemendag menjalankan program pembinaan industri kecil dan menengah. Sisi negatif Kabupaten Kebumen yaitu kurangnya alokasi anggaran pemberdayaan industri khususnya industri genteng. Kurangnya alokasi anggaran ini disebabkan oleh penggunaan 70% untuk gaji pegawai negeri sipil.

Mendapat alokasi dana dari APBN pusat, pemerintah daerah mengadakan pelatihan dan

pendampingan pada pengusaha genteng. Pelatihan-pelatihannya meliputi teknik pembakaran, pemilihan bahan baku, dan pemasaran. Pelatihan dan pendampingan ini terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Pejagoan, Klirong, dan Sruweng. Alasan pemilihan tiga Kecamatan tersebut dikarenakan daerah dengan jumlah penghasil genteng terbanyak di Kebumen. Pelatihan diikuti oleh 20 orang dari 3 kecamatan tersebut. Terlepas dari jumlah peserta sebanyak 20 orang, peserta tersebut merupakan anggota kelompok usaha genteng bernama "Mitra Mandiri".

Pemberdayaan ini dapat dilihat dari bantuan alat yang diberikan dari Kemendag melalui Disperindaglasar. Alat yang diberikan berupa 6 buah press hidrolik ditaksir mencapai harga sebesar 50 juta rupiah. Alat ini berguna untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia dalam pembuatan genteng dan produktivitas genteng, yang disebabkan banyaknya pekerja yang berkeinginan menjadi TKI dan buruh pabrik.

Tidak hanya bantuan alat namun pemasaran menjadi penting untuk sebuah industri. Pasalnya industri tanpa dipasarkan maka tidak terjadi perputaran uang. Fasilitasi pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu kerjasama antar dinas. Seperti halnya Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan Kabupaten Kotawaringin Barat, diharapkan dengan hal itu terciptanya pasar industri genteng di luar pulau Jawa.

Adanya program yang berasal dari Kemendag untuk pemberdayaan industri genteng, secara tidak langsung muncul hambatan yang kentara. Hambatan finansial yang cukup memberatkan pengusaha genteng dalam proses produksi, mengingat untuk memproduksi genteng bahan baku didapat dengan cara membeli.

Setiap pembelian tanah sudah dibentuk kotak/kweh. Untuk harga 1 kweh bisa mencapai Rp 250.000-300.000. Hal inilah yang membuat ongkos produksi semakin membengkak.

Selain faktor finansial muncul faktor non-finansial yaitu kurangnya tenaga kerja, kurang mampunya masyarakat dalam mengelola keuangan bisnisnya, masih sederhananya teknologi yang digunakan dan muncul calo yang meresahkan produsen dan konsumen genteng. Calo disini sebagai pengatur harga, sehingga tidak memungkinkan terjadinya tawar menawar dengan konsumen. Kerugian produsen yaitu tidak bisa menetapkan harga jual sesuai kehendaknya. Konsumen juga diresahkan yang awalnya genteng bisa dibeli Rp 600,-per buah, namun ketika beli dicalo harganya bisa naik menjadi Rp. 1000,- per buah.

Selain masalah yang dihadapi oleh pengusaha genteng, masalah juga melanda Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mengimplementasikan program pembinaan industri kecil dan menengah. Hambatan paling kentara yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya. Faktor komunikasi menjadi penting karena dinas dituntut

konsisten dalam mentransmisikan informasi-informasi. Dalam hal ini Disperindaglasar kekurangan sumberdaya manusia dan finansial. Sebab sumberdaya manusia di dinas terbesbut kurang sehingga menyulitkan dalam sosialisasi program pemerintah.

Masalah sumberdaya finansial menjadi penting karena alokasi APBD untuk industri sangat kecil sehingga menyulitkan dinas memberdayakan industri. Untuk APBD 2013 konsentrasi keuangan berfokus pada belanja pegawai hingga mencapai 70,99% inilah yang menyulitkan pemberdayaan.

Peranan pemerintah daerah dalam industri genteng adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan suatu keadaan atau hasil yang ingin dicapai, yaitu industri genteng yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk bersaing dengan industri substitusi genteng.

Pemerintah memberdayakan industri genteng melalui pelatihan dan pendampingan, bantuan secara fisik, serta pemasaran. Pemberdayaan tersebut mendapat alokasi dana dari APBN Pusat melalui Kementerian Perdagangan. Sebelum adanya alokasi program tersebut kelompok usaha genteng “Mitra Mandiri” telah mengajukan proposal berkaitan dengan meminta difasilitasi industrinya. Setelah itu muncul program pembinaan industri kecil dan menengah dari Kemendag.

Sifat dari program tersebut *top-down*, meskipun *top-down* namun ada inisiatif dari warga yang meminta difasilitasi. Meskipun berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mempertahankan eksistensi industri genteng, namun masalah bahan baku, tenaga kerja dan manajemen usaha masih menjadi kendala utama yang dikeluhkan pengusaha genteng. Tidak hanya pengusaha genteng yang mengalami hambatan dalam mengembangkan bisnisnya, pemda sendiri juga mengalami hambatan

dalam mengimplementasikan programnya seperti komunikasi dan sumberdaya. Komunikasi yang tidak merata juga disebabkan oleh sumberdaya manusia dan finansial yang kurang. Jika hal itu tidak dibenahi, maka dapat memicu kecemburuan di hati masyarakat.

Dari Hasil tersebut dapat direkomendasikan :

1. Perlunya komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri melalui alokasi anggaran APBD dan para SKPD terkait.
2. Proses sosialisasi pemberdayaan industri hendaknya merata dan transparan yang bisa diakses untuk masyarakat yang membutuhkan.
3. Memfasilitasi industri khususnya industri genteng dalam mengakses pasar melalui internet.
4. Memfasilitasi memperkuat dan memperluas jaringan usaha

berskala nasional sebagai wadah komersialisasi produk.

5. Memfasilitasi semua industri dalam pelatihan pengembangan diri, ketrampilan, manajemen keuangan, promosi, pemasaran, dan evaluasi usaha.
6. Memfasilitasi pelatihan inovasi produk selain genteng namun masih berbahan baku sama dengan kuantitas kecil serta memiliki nilai ekonomis tinggi.
7. Perlunya sistem perbaikan lahan pasca pengerukan lahan dan lokalisir tempat galian sehingga menjaga stabilitas ekosistem.

Daftar Pustaka

- Amiruddin S, Asli Rambe, dan Mahidin. (2006). *Manajemen Pengawas Pendidikan*. Jakarta: Quantum Teaching.
- E.St. Hararap, dkk. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung : Balai Pustaka.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lexy J. Moeloeng, M.A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Elex Media Computindo
- _____. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo Jakarta: Media Komputindo.
- Partadirja, Ace dan Didik.J. Rachbini (ed). (1985). *Ekonomika Etik dalam, Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Poerwadarminta, WJS. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Balai Pustaka
- Prawirokusumo. (2001). *Pengembangan Usaha Dan Menengah*. Jakarta: Bumi aksara.
- Siswanto, Bejo. (1989), *Manajemen Tenaga Kerja, Rancangan Dalam Pendayagunaan dan Pengembangan Unsur Tenaga Kerja*. Bandung: Sinar Baru.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sumaryadi, I nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama.
- Usman, Sunyoto. (2004). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori Dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- _____. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho D. (2007): *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia/Elexmedia Komputindo.
- Golongan C Prospektif : Kabupaten Kebumen, 2005.*

PUSTAKA LEMBAGA

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2011-2015, Kabupaten Kebumen.
- Laporan Akhir *Analisis Persediaan, Kebutuhan dan Pemanfaatan Bahan Baku Galian*

